

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan umumnya menjadikan laba sebagai fokus utama. Padahal tanggung jawab perusahaan tidak hanya menghasilkan laba, tetapi juga harus memperhatikan dampak aktivitasnya, baik lingkungan maupun sosial. Salah satu dampak aktivitas perusahaan adalah terjadinya kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan terjadi karena perilaku perusahaan yang hanya mementingkan keuntungan bisnis dan tidak menghiraukan terjadinya kerusakan yang mengakibatkan sumber daya alam tidak terbaharukan (Wintoro, 2012). Permasalahan lingkungan hidup menjadi perhatian yang serius, baik oleh konsumen, investor, maupun pemerintah. Pada umumnya, para investor lebih tertarik pada perusahaan yang menerapkan manajemen lingkungan hidup yang baik dan tidak mengabaikan masalah pencemaran lingkungan. Kepentingan bisnis yang menunjukkan reputasi, kredibilitas, dan *value added* bagi perusahaan di mata *stakeholder* menjadi dorongan perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan hidup di *annual report*.

Pengungkapan lingkungan merupakan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan lingkungan di dalam laporan tahunan perusahaan (Nurleli, 2016). Pengungkapan lingkungan (*environmental disclosure*) juga merupakan wujud pertanggungjawaban sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Melalui pengungkapan lingkungan dalam laporan tahunan, masyarakat dapat memantau aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan (Effendi et al., 2012). Wailanduw (2017) juga menjelaskan bahwa *environmental disclosure* merupakan pengungkapan perusahaan terhadap dampak dari aktivitas perusahaan pada lingkungan fisik atau alam di lingkungan perusahaan tersebut beroperasi. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, namun juga membantu dalam memecahkan permasalahan terkait resiko dan ancaman terhadap keberlanjutan dalam lingkup hubungan sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui pengungkapan lingkungan (*environmental disclosure*) (GRI, 2013).

Environmental Disclosure pada mulanya bersifat *mandatory* (wajib) dan *voluntary* (sukarela). Sifat *mandatory* dikarenakan adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan perusahaan dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat 1 yang menyatakan bahwa: (1) Perseroan yang

menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan. (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain itu pasal 66 ayat 2c mewajibkan semua perseroan terbatas untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Laporan Tahunan, sehingga pengungkapan informasi terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan lebih bersifat *mandatory*. Standar pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan telah banyak dikembangkan diantaranya adalah *The Nation Global Impact*, *Social Accountability 8000*, dan *The Global Reporting Initiative*, tetapi belum ada peraturan baku mengenai standar pengungkapan informasi lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan pengungkapan lingkungan masih bersifat *voluntary* (sukarela) sesuai kebijakan perusahaan.

Minimnya kepedulian tanggung jawab pada lingkungan oleh perusahaan publik di Indonesia menimbulkan banyak permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan adalah faktor penting yang harus dipikirkan karena pengelolaan lingkungan yang buruk akan menyebabkan terjadinya berbagai macam bencana. Lingkungan hidup yang akhir-akhir ini terjadi seperti perubahan iklim, penipisan lapisan ozon, hujan asam, limbah bahan berbahaya dan beracun serta degradasi keanekaragaman hayati telah menjadi sorotan di dunia internasional dan meresahkan masyarakat dunia. Hal tersebut disebabkan oleh praktik industri yang menggunakan teknologi dan bahan-bahan kimia berbahaya dan beracun serta tidak bertanggung jawab dalam upaya maksimalisasi laba yang dilakukan oleh perusahaan (Kurniawan, 2019).

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, pada tahun 2014 mengenai status lingkungan hidup indonesia dalam opini publik menyatakan bahwa kondisi lingkungan di Indonesia dalam bahaya, Mongabay, (2014). Dan menurut Siregar, dkk

(2013) di Indonesia, sekitar 15-20 persen dari limbah dibuang dengan baik, akan tetapi sisanya dibuang ke sungai yang tentunya akan menimbulkan banjir. Selain banjir, masalah yang ditimbulkan oleh limbah pabrik adalah pencemaran air sungai yang mengakibatkan kualitas air bersih pun memburuk. Pada era saat ini, sebagian besar perusahaan menitikberatkan pekerjaan pada penggunaan teknologi yang efisien sehingga terkadang mengabaikan aspek lingkungan. Perusahaan yang menjadi sorotan utama dalam kontribusinya terhadap lingkungan yaitu kasus pencemaran limbah udara pada PT. Rayon Utama Makmur Sukoharjo, selain itu, terjadinya permasalahan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang tidak sesuai aturan pada PT. Indotama, dan terjadinya pencemaran air oleh PT. Energi Agro Nusantara. Situasi ini mendorong masyarakat untuk menuntut kesadaran akan pentingnya arti lingkungan dalam menerbitkan tanggungjawab sosial perusahaan yang lebih berkualitas, sehingga permasalahan yang timbul akibat aktivitas industri yang berdampak pada lingkungan dapat terminialisir (Fitriana, 2013).

Masalah tentang pencemaran lingkungan patut diperhatikan bagi *stakeholders* maupun *shareholders*. Pada umumnya investor lebih memilih perusahaan yang memerhatikan aspek lingkungan (Permatasari, 2010). Lingkungan merupakan bagian penting dalam menentukan kualitas, kuantitas, serta keberlangsungan masa depan perusahaan dan aktivitas manusia. Perusahaan perlu melaporkan aktivitas- aktivitas terkait dengan penanganan lingkungan (Tze et al., 2015). Di Indonesia terdapat kasus yang timbul akibat pencemaran lingkungan. Menurut Sindonews tahun 2016 PT Putera Restu Ibu Abadi adalah perusahaan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun perusahaan tersebut melakukan pencemaran lingkungan. Air sumur di pemukiman warga menjadi tercemar, dan timbul bau busuk yang menyengat. Perusahaan tersebut melakukan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun ke dalam tanah. Penimbunan tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah. Hal itu terbukti melakukan kelalaian mengakibatkan kerusakan lingkungan di sekitar perusahaan tersebut. Kasus pencemaran lingkungan merupakan dampak negatif yang timbul dari aktivitas perusahaan.

Berdasarkan fenomena ini, maka perusahaan kemudian didorong oleh masyarakat dan pemerintah agar lebih memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Selain itu, perusahaan juga dituntut untuk mengungkapkan (*disclosure*) informasi lingkungan terkait dengan aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan. Perusahaan penting melakukan pengungkapan karena untuk meningkatkan citra perusahaan yang lebih baik dimata masyarakat luas (Miranti, 2009).

Proporsi komisaris *independent* atas jumlah seluruh anggota dewan komisaris merupakan variable yang sering digunakan untuk menguji pengaruh *corporate governance* terhadap *environmental disclosure*. Karakteristik personal komisaris utama juga mempengaruhi *environmental disclosure* karena adanya hubungan antara pengungkapan informasi lingkungan dengan factor dominan komisaris utama pribumi yang menduduki jabatan tersebut. Latar belakang pendidikan dewan komisaris dalam bidang akuntansi atau keuangan merupakan salah satu karakteristik dewan komisaris. Menurut Sanjaya (2013), menyatakan bahwa dewan komisaris independen berperan penting dalam meningkatkan image perusahaan. Oleh karena itu, dewan komisaris independen dapat mendorong perusahaan mengungkapkan informasi sosial dan lingkungannya, karena hal tersebut dapat meningkatkan image perusahaan dimata masyarakat.

Keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan berfungsi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan adanya komite audit, perusahaan akan lebih meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga pengungkapan informasi dalam *annual report* akan diperluas sesuai dengan aktivitas perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, komite audit sedikitnya mengadakan pertemuan 4 kali dalam satu tahun. Komite audit memegang peran yang cukup penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, karena bagian dari dewan komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan. Menurut Sulistyowati (2014), menyatakan bahwa Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional dan independen kepada dewan komisaris mengenai laporan atau hal-hal lain yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, serta untuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.

Latar belakang pendidikan presiden komisaris yang berasal dari bisnis (keuangan) juga menjadi variabel penentu. Presiden komisaris yang mempunyai latar belakang pendidikan keuangan atau bisnis biasanya berpengaruh terhadap pengetahuan yang dimiliki, meskipun bukan menjadi suatu keharusan bagi seseorang yang akan masuk dunia bisnis untuk berpendidikan bisnis, akan lebih baik jika anggota dewan memiliki latar belakang pendidikan bisnis dan ekonomi (Kusumastuti, Supatmi, dan Sastra, 2006). Karakteristik personal presiden komisaris juga mempengaruhi *environmental disclosure*. Hal ini dijelaskan oleh penelitian Permatasari (2009) yang menunjukkan adanya hubungan antara pengungkapan informasi lingkungan dengan faktor dominan presiden komisaris pribumi yang menduduki jabatan tersebut.

Selain itu sebagai contoh lain reduksi etnis yang terjadi pada permasalahan yang berkaitan dengan kerjasama social-budaya yang terjalin antara dua etnis yang berbeda yang mempunyai kontribusi besar dalam dunia bisnis di Indonesia adalah etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa dinilai memiliki etos kerja tinggi, memiliki filosofi bisnis yang menjadi ciri khasnya, yaitu hemat dan disiplin bila dibandingkan dengan orang pribumi sendiri. Dengan adanya budaya dan etos kerja yang tinggi dapat meningkatkan kinerja dalam hal ini adalah kinerja presiden komisaris. Keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan berfungsi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan adanya komite audit, perusahaan akan lebih meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga pengungkapan informasi dalam annual report akan diperluas sesuai dengan aktivitas perusahaan.

Kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen. Adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap kecurangan yang dilakukan oleh manajemen (Putra, 2013). Hal ini berarti kepemilikan institusional dapat menjadi pendorong perusahaan untuk melakukan usaha-usaha positif guna meningkatkan nilai perusahaan seperti pengungkapan tanggung jawab sosial, karena investor menginginkan transparansi atas semua kegiatan yang dilakukan perusahaan apalagi kegiatan yang dapat berguna bagi kelangsungan hidup perusahaan.

Penelitian ini mengacu pada Permatasari (2009). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variable independen dan perusahaan. Penelitian ini menambah variabel independen yaitu kepemilikan institutional. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Alasan menggunakan sampel perusahaan manufaktur adalah karena perusahaan manufaktur lebih luas dalam pengungkapan lingkungan dan memiliki dampak yang cukup besar terkait dengan pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik yang dihasilkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* dengan *environmental disclosure*. Serta penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate*

governance dalam hal ini mengenai proporsi dewan komisaris independent, latar belakang etnis (*culture*), latar belakang Pendidikan dewan komisaris, komite audit serta kepemilikan institutional dengan *environmental disclosure*. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Corporate Governance, Etnis, dan Latar Belakang Pendidikan terhadap Environmental Disclosure (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019)**”.

1.2 Ruang Lingkup

Untuk mempermudah dalam pengumpulan data dan masalah yang dibahas, diperlukan dengan adanya pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini membahas pengaruh *corporate governance*, etnis, dan latar belakang pendidikan terhadap *environmental disclosure*. Data penelitian ini diambil pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019.

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan *environmental disclosure*?
2. Apakah proporsi komite audit independen berpengaruh signifikan *environmental disclosure*?
3. Apakah latar belakang *culture* atau *ethnic* presiden komisaris berpengaruh signifikan *environmental disclosure*?
4. Apakah latar belakang pendidikan dewan komisaris berpengaruh signifikan *environmental disclosure*?
5. Apakah kepemilikan institutional berpengaruh signifikan *environmental disclosure*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh proporsi komisaris independen terhadap *environmental disclosure*.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh proporsi komite audit independen terhadap *environmental disclosure*.

3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh latar belakang *culture* atau *ethnic* terhadap *environmental disclosure*.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh latar belakang pendidikan terhadap *environmental disclosure*.
5. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap *environmental disclosure*.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini diharapkan mampu mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat memberikan kontribusi terhadap literature penelitian akuntansi khususnya mengenai *corporate governance* dengan *environmental disclosure* di Indonesia.
2. Bagi perusahaan dapat memberikan masukan dalam perbaikan penerapan *corporate governance* dan pelaporan aktivitas lingkungan hidup dalam *annual report*.
3. Bagi *stakeholder* seperti investor, kreditur dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, dapat menjadi acuan tambahan dalam menganalisis informasi yang disajikan oleh perusahaan berkenaan dengan *corporate governance* dan *environmental disclosure* dalam *annual report*.
4. Bagi regulator penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam penentuan kebijakan lingkungan hidup.
5. Bagi kalangan akademisi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai literature dalam bidang akuntansi.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang terbatas dalam tiap-tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang berhubungan dengan tipik penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan bangunan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, metode analisis data, pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai deskripsi data (deskripsi objek penelitian, deskripsi variabel penelitian), hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian terakhir dari laporan penelitian ini yang berisi simpulan, dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisi daftar buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian orang lain, dan bahan-bahan lain yang dijadikan sebagai referensi dalam pembahasan skripsi.

LAMPIRAN

Bagian ini berisi data yang dapat mendukung atau memperjelas pembahasan atau uraian yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya. Data tersebut dapat berupa gambar, table, formulir ataupun flowchart.